

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**M. AGUNG WIRAWAN ARIF**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

# **SKRIPSI**

## **DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

**M. AGUNG WIRAWAN ARIF**

**A011181330**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

disusun dan diajukan oleh

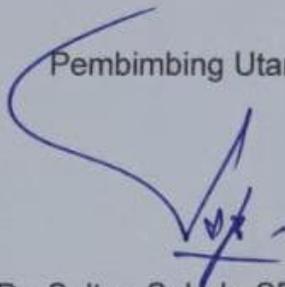
**M. AGUNG WIRAWAN ARIF**

**A011181330**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

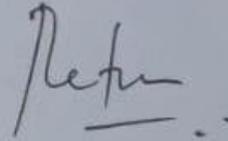
Makassar, 12 November 2024

Pembimbing Utama



Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.  
NIP. 19691215 199903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19770913 200212 2 002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

# SKRIPSI

## DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh:

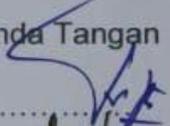
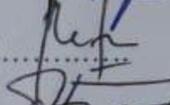
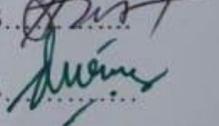
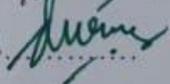
**M. AGUNG WIRAWAN ARIF**

**A011181330**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal 12 November 2024 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Ketua	1..... 
2. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Anggota	3..... 
4. Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si.,CWM®	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®  
NIP. 19740715 200212 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **M. AGUNG WIRAWAN ARIF**  
Nomor Pokok : A011181330  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Hasanuddin  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Determinan Ketimpangan Pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 November 2024  
Yang menyatakan



**(M. Agung Wirawan Arif)**  
**A01181330**

## PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa menganugrahkan kesehatan dan kekuatan, serta atas izin-Nya pulalah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Determinan Ketimpangan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat**” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik itu langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini juga tidak luput dari kekurangan dan kesalahan-kesalahan karena keterbatasan dari peneliti.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Ayahanda Muhammad Arif dan Ibunda Hardiana yang telah banyak mendoakan, mendidik dan membesarkan dengan setulus dan penuh kasih sayang tanpa batas kepada penulis sehingga studi ini dapat diselesaikan walaupun bukan pada waktunya tetapi tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, menjaga dan memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah dilakukan oleh beliau. Kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat peneliti sebutkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi kepada peneliti.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi UNHAS, dan dan Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, SE., M.Si. selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi UNHAS. Terima kasih atas segala bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Ekonomi.
3. Bapak Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si. selaku penasihat akademik. Terima kasih atas segala arahan, petunjuk dan motivasi kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Sultan Suhab, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing pendamping. Terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, arahan, saran, kesabaran dan waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Bapak dan Ibu dosen pembimbing.
5. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® dan Ibu Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM® selaku dosen penguji. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik dan saran yang membangun sehingga lebih menyempurnakan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran dan bantuan selama masa studi penulis.
7. Staf dan karyawan akademik, Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terkhusus Pak Oskar dan Pak Rahim yang telah banyak membantu dalam segala hal terkait berkas dan dokumen akademik.

8. Saudariku Arina nur alfiah yang selalu menjadi pendukung dalam proses penulisan. Terima kasih atas segala bantuan dan petunjuknya.
9. Teman Angkatan “LANTERN 2018” terima kasih telah menjadi teman angkatan rasa saudara di kampus yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan dan doa.
10. Teman-teman KKN Tematik Gel.106 TAMALANREA 4, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dan penyemangat dalam menjalankan KKN Covid-19 makassar recover.
11. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mengharap kritik dan saran yang membangun karena penulis sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, maka sepenuhnya berasal dari penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 November 2024

**M. Agung Wirawan Arif**

## ABSTRAK

### DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

M. Agung Wirawan Arif

Sultan Suhab

Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan Kabupaten di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari *cross-section* 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dan *time-series* tahun 2014 sampai tahun 2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kabupaten di Sulawesi Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dan diolah menggunakan program Eviews12 dan model yang dipilih yaitu *Common Effect Model* (CEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Sulawesi Barat pada taraf 5% dengan probabilitas 0,016. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Sulawesi Barat pada taraf 5% dengan probabilitas lebih dari 0,05.

**Kata Kunci:** PDRB, IPM, TPT, Pertumbuhan Penduduk, Ketimpangan Pendapatan

## **ABSTRACT**

### **DETERMINANTS OF REGENCY INCOME INEQUALITY IN WEST SULAWESI PROVINCE**

**M. Agung Wirawan Arif**

**Sultan Suhab**

**Retno Fitrianti**

*This study aims to determine the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI), Open Unemployment Rate (OUR), and Population Growth on Income Inequality in Districts in West Sulawesi. This study uses panel data, namely a combination of cross-sections of 6 districts in West Sulawesi Province and time-series from 2014 to 2023. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of the Districts in West Sulawesi. The analysis method used is panel data regression analysis, and it is processed using the Eviews12 program, and the selected model is the Common Effect Model (CEM). The results of the study show that Gross Regional Domestic Product has a significant effect on income inequality in districts in West Sulawesi at the 5% level with a probability of 0.016. In addition, the Human Development Index (HDI), open unemployment rate (OUR), and population growth do not affect income inequality in districts in West Sulawesi at the 5% level with a probability of more than 0.05.*

**Keywords:** GRDP, HDI, OUR, Population Growth, Income Inequality

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1. Tinjauan Teoritis.....	8
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan .....	8
2.1.2 Produk Domestik regional Bruto .....	12
2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	13
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	15
2.1.5. Pertumbuhan Penduduk .....	16
2.2. Hubungan antar variabel .....	18
2.3. Studi Empiris .....	22
2.4. Kerangka Konseptual .....	25
2.5. Hipotesis Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>

3.1.	Ruang Lingkup Penelitian .....	27
3.2.	Lokasi Penelitian .....	27
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5.	Metode Analisis Data .....	28
3.5.1.	Analisis Regresi.....	28
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik .....	29
3.5.3.	Uji Hipotesis.....	31
3.6.	Definisi Operasional Variabel .....	32
<b>BAB IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	34
4.1.1.	Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	34
4.1.2.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	35
4.1.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	36
4.1.4.	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	37
4.1.5.	Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	38
4.2.	Perkembangan Variabel Penelitian .....	39
4.2.1.	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023 .....	39
4.2.2.	Perkembangan Data Domestik Regional Bruto Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	41
4.2.3.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023 .....	43
4.2.4.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023 .....	46
4.2.5.	Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023.....	48
4.3.	Hasil Estimasi.....	50
4.3.1.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	51
4.3.2.	Hasil Uji Statistik.....	53

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
5.1. Kesimpulan .....	64
5.2. Saran.....	65
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>66</b>
<b>Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian .....</b>	<b>69</b>
<b>Lampiran 2: Hasil Estimasi .....</b>	<b>70</b>
<b>Lampiran 3: Data Penelitian.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 .....	2
4.1 Gini Rasio Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat .....	41
4.2 Domestik Regional Bruto Provinsi Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat	42
4.3 IPM Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat .....	44
4.4 TPT Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat .....	47
4.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat .....	49
4.6 Hasil uji Multikolinieritas .....	53
4.7 Analisis Regresi variabel Koefisien .....	54
4.8 Hasil Uji R <i>Square</i> .....	55
4.9 Hasil Uji Parsial (uji t).....	56
4.10 Hasil Uji Simultan (uji F).....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
4.1 PDRB Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023 .....	34
4.2 IPM Sulawesi Barat Tahun 2014-2023 .....	35
4.3 TPT Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023 .....	36
4.4 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023.....	37
4.5 Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2023..	38
4.6 Hasil Uji Normalitas.....	53
4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Surat Keterangan Penelitian .....	69
2 Hasil Pengolahan Data .....	70
3 Data Penelitian.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu kriteria keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor bahan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar. Indeks ketimpangan yang lazim dikenal dengan “Koefisien Gini” mencerminkan ketimpangan pendapatan rakyat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) yang apabila skalanya mendekati angka satu, mencerminkan suatu ketimpangan sempurna (Ferialiani et al., 2021).

Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, maka tidak mengherankan bila pola pembangunan ekonomi wilayah di Indonesia tidak seragam. Ketidakseragaman ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya akan mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga

sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan sosial dan kemiskinan.

Ketimpangan juga dapat dipicu oleh perbedaan pembangunan antar daerah. Adanya disparitas antar daerah semakin diperparah akibat tidak efisiennya pemerataan daerah seperti mobilitas tenaga kerja, upah, dan investasi. Sebagai salah satu provinsi muda di Indonesia, Provinsi Sulawesi Barat dengan 6 Kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup rendah jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Kabupaten Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)**

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Majene	20.840.528	20.227.041	20.402.305	20.595.759	21.384.198
Polewali Mandar	21.498.768	19.363.314	19.478.959	19.927.801	20.588.110
Mamasa	14.084.592	13.560.576	13.649.690	13.686.725	13.847.618
Mamuju	28.898.886	29.287.586	29.469.079	29.919.421	30.717.042
Pasangkayu	42.602.166	37.920.839	38.525.237	37.761.497	39.566.731
Mamuju Tengah	16.929.461	16.387.531	16.618.856	16.681.101	16.829.884

Sumber: BPS Prov. Sulawesi Barat (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita terhitung sejak 2019-2023. Namun dari 6 kabupaten di Sulawesi Barat hanya kabupaten Pasangkayu yang nilai PDRB per kapitanya jauh jaraknya dari kabupaten lainnya, yaitu Rp 39.566.731 juta. Sedangkan yang terendah PDRB per kapitanya pada tahun 2023 adalah Kabupaten Mamasa sebesar Rp 13.847.618 juta.

Fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat karena adanya perbedaan PDRB

per kapita antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang cukup signifikan. Hal ini merupakan indikator adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Ketidaksetaraan laju pertumbuhan PDRB ini menunjukkan bahwa kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran unik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektoralnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah PDRB per kapita. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sementara semakin rendah nilai PDRB per kapita, semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Dampaknya adalah adanya disparitas pendapatan, yang merupakan fenomena umum dalam kegiatan ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan metrik penting pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu (satu tahun), yang berasal dari semua kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. PDRB merupakan total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua entitas bisnis di wilayah tertentu. Pengeluaran. Makipantung et al., (2023) menemukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dengan arah negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara Putri (2016) menemukan adanya pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Farhan & Sugianto (2022) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Makipantung et al., (2023) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimana masyarakat yang berusia produktif bersekolah cenderung memilih mengejar ilmu di daerah sekitaran perkotaan dikarenakan tersedianya infrastruktur pendidikan yang lebih maju dibandingkan daerah asal.

Attaqi (2023) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sahal (2023) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program pelatihan membuat tingkat pengangguran dapat terkendali sehingga tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Susanto et al., 2023). Hal ini disebabkan karena adanya migrasi menuju wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang belum signifikan sehingga penelitian ini dilakukan untuk memastikan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

Penelitian ini menggunakan teori Kuznets karena teori ini menekankan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan lurus dengan pertumbuhan ekonomi, pada saat produktivitas tenaga kerja meningkat akan mempengaruhi *output*, meningkatnya *output* terindikasi bahwa pekerja wilayah sekitar produktif dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Output* tersebut akan terhitung dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah dan akan mengurangi tingkat perbedaan pendapatan. Selain itu, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang juga membahas mengenai ketimpangan pendapatan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Namun, peneliti terdahulu menggunakan data-data lama, maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menguji ketimpangan pendapatan yang ada di Kabupaten pada Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan data-data baru dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Data-data baru tersebut yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sekarang dengan penelitian dahulu.

Dari uraian diatas, menyadari pentingnya peranan berbagai macam faktor seperti PDRB, IPM, TPT, dan Pertumbuhan penduduk, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Determinan Ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Periode 2014-2023”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka dari penelitian ini dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023
2. Apakah Indeks Pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023
3. Apakah Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023
4. Apakah Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023

2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2014-2023.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pendapatan kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan ketimpangan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan penduduk.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan merupakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, seperti tidak adil atau tidak teratur. Sedangkan, pendapatan merupakan penghasilan yang diterima baik oleh sektor formal maupun informal dalam suatu periode tertentu (Attaqi, 2023). Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat (Todaro, 2004).

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran ekonomi ekonomi antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin yang terlihat dari perbedaan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menimbulkan inefisiensi perekonomian, merusak dan melemahkan stabilitas dan solidaritas sosial serta menjadi hal yang dianggap tidak adil (Prasetya et al., 2022).

Ada delapan faktor terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan, adalah:

- 1) Tingginya pertumbuhan penduduk yang berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita.

- 2) Inflasi
- 3) Terdapat perbedaan pembangunan antar daerah wilayah.
- 4) Investasi yang cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal, yang menyebabkan penambahan pengangguran.
- 5) Rendahnya mobilitas penduduk
- 6) Terpuruknya nilai tukar negara berkembang terhadap negara maju
- 7) Industri padat karya semakin memburuk
- 8) Adanya kebijakan substitusi impor yang berdampak pada peningkatan harga hasil industri.

Distribusi pendapatan menunjukkan merata atau tidaknya Pembangunan suatu wilayah dalam masyarakat. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan yaitu:

1. Gini Rasio

Koefisien Gini adalah ukuran tingkat ketimpangan pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan ketika koefisien yang mendekati 1 berarti distribusi pendapatan tidak merata. Dengan kata lain, koefisien Gini yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata atau ketimpangan pendapatan yang semakin kecil, sementara koefisien gini yang lebih tinggi mengindikasikan distribusi pendapatan yang lebih timpang antar masyarakat. Dalam kasus yang ekstrim, koefisien Gini 0 berarti ada pemerataan yang sempurna, dengan semua orang mendapatkan pendapatan yang sama persis. Koefisien gini

sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna, di mana satu orang memiliki seluruh pendapatan dan yang lainnya tidak memiliki pendapatan sama sekali. Kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien Gini adalah sebagai berikut: lebih besar dari 0,5 berarti tingkat ketimpangan tinggi, antara 0,35 dan 0,5 berarti tingkat ketimpangan sedang, dan lebih kecil dari 0,35 berarti tingkat ketimpangan rendah (Todaro, 2004).

## 2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menunjukkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kurva yang lebih dekat ke diagonal (semakin lurus) artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya jika kurva Lorenz lebih jauh dari diagonal (semakin lengkung) maka distribusi pendapatan semakin tidak merata atau semakin timpang.

Namun, penelitian ini akan menggunakan gini rasio untuk mengukur ketimpangan pendapatan karena koefisien gini merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan yang memenuhi empat kriteria adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip anonimitas (*anonymity principle*): ukuran ketimpangan seharusnya tidak bergantung pada siapa yang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, ukuran tersebut tidak bergantung pada apa yang kita yakini sebagai manusia yang lebih baik, apakah itu orang kaya atau orang miskin.

- b) Prinsip independensi skala (*scale independence principle*): ukuran ketimpangan kita seharusnya tidak tergantung pada ukuran suatu perekonomian atau negara, atau cara kita mengukur pendapatannya. Dengan kata lain, ukuran ketimpangan tersebut tidak bergantung pada apakah kita mengukur pendapatan dalam dolar atau dalam sen, dalam rupee atau dalam rupiah, atau apakah perekonomian negara itu secara rata-rata kaya atau miskin.
- c) Prinsip independensi populasi (*population independence principle*): prinsip ini menyatakan bahwa pengukuran ketimpangan seharusnya tidak didasarkan pada jumlah penerima pendapatan (jumlah penduduk). Misalnya, perekonomian Cina tidak boleh dikatakan lebih merata atau lebih timpang daripada perekonomian Vietnam hanya karena penduduk Cina lebih banyak.
- d) Prinsip transfer (*transfer principle*): prinsip ini juga sering disebut sebagai prinsip *Pigou-Dalton*. Prinsip ini menyatakan bahwa dengan mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan, jika kita mentransfer sejumlah pendapatan dari orang kaya ke orang miskin (namun tidak sangat banyak hingga mengakibatkan orang miskin itu sekarang justru lebih kaya daripada orang yang awalnya kaya tadi), maka akan dihasilkan distribusi pendapatan baru yang lebih merata.

Selain itu, gini rasio sebagai metode perhitungan yang sering digunakan dalam melihat seberapa besar angka ketimpangan pendapatan yang terjadi (Badan Pusat Statistik, 2024).

### **2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan tingkat keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. PDRB per kapita dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB per kapita yang dirujuk dalam penelitian ini mengacu pada PDRB per kapita dengan harga konstan. PDRB per kapita dinyatakan dalam mata uang rupiah (Mulyani & Sakti, 2022).

Produk Domestik Regional Bruto, sebagaimana didefinisikan oleh BPS (2013), merupakan nilai tambah agregat yang dihasilkan oleh semua entitas produksi dalam bentuk produk dan layanan di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto dengan harga berlaku mengukur nilai tambah barang dan jasa, diukur setiap tahun menggunakan harga yang berlaku, untuk menggambarkan besarnya kerangka ekonomi dan signifikansi sektor ekonomi yang ada. Produk Domestik Regional Bruto dengan harga konstan mencerminkan nilai tambah barang dan jasa, dihitung menggunakan harga dari tahun tertentu sebagai titik acuan, digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan tahunan.

Produk Domestik Regional Bruto mencakup dua metode penyajian berikut:

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah produk dan jasa yang dihitung dengan

menggunakan harga tahun berjalan, yang berlaku dalam penilaian produksi, biaya antara, atau nilai tambah.

2) Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah produk dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga tahun acuan tertentu, yang berlaku dalam penilaian produksi, biaya antara, atau komponen nilai tambah.

### **2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Konsep IPM pertama kali *dipublikasikan United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Human Development Report*. Dalam publikasi ini pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” yang berarti suatu proses untuk meningkatkan aspek kehidupan manusia. Aspek yang terpenting adalah berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk dapat memiliki standar hidup secara layak (Mulyani & Sakti, 2022).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara yang merupakan kombinasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan perkapita. Manusia merupakan aset suatu bangsa, jika masyarakat dapat hidup sehat dan berpengetahuan baik maka produktivitas yang akan didapat oleh suatu wilayah / daerah akan meningkat dan memengaruhi kelayakan hidup masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan konsep IPM yang

mengarahkan penduduk agar mendapat akses kesehatan yang memadai, pendidikan yang terarah, dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai berikut:

1. Memiliki umur panjang Umur

Panjang merupakan alat untuk mengukur tingkat kesehatan dan asupan gizi. Umur panjang diukur dengan melihat angka kelahiran dan harapan hidup dalam satu tahun. Angka harapan hidup ini mengasumsikan bahwa pada tahun tertentu, setiap kelompok usia akan mengalami kematian dalam masa hidupnya.

2. Tingkat pendidikan

Aspek pendidikan diukur menggunakan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata melek huruf mengacu pada penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat menulis dan membaca. Rata-rata lama sekolah di tingkat pendidikan formal adalah 15 tahun ke atas, sedangkan indikator pendidikan dihitung dari seberapa banyak penduduk usia 15 tahun keatas yang telah dan sedang menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi

3. Standar Hidup

Standar hidup manusia diukur berdasarkan pendapatan per kapita riil dan disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang masing-masing negara yang mengindikasikan biaya hidup di setiap negara. Dari hal tersebut standar kehidupan setiap negara dapat diketahui. Negara dengan standar hidup tinggi memiliki pendapatan yang tinggi,

ketimpangan pendapatan rendah, sistem pendidikan berkualitas tinggi, dan kualitas kesehatan masyarakat baik. Di sisi lain, negara dengan standar hidup rendah memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi, kualitas kesehatan rendah, dan kualitas pendidikan yang rendah.

#### **2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Salah satu aspek untuk mengukur kinerja suatu perekonomian adalah tingkat pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. penganggur terbuka terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Beberapa kendala seperti tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di Negara Sedang Berkembang (NSB) menjadi semakin serius.

### **2.1.5. Pertumbuhan Penduduk**

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi (Arafah & Khoirudin, 2022).

Jumlah penduduk merupakan jumlah total dari seseorang atau sekelompok orang yang menempati satu daerah/wilayah yang sama. Penduduk didefinisikan sebagai seseorang/individu yang menempati suatu daerah dengan jangka waktu yang lama. Penduduk tersebut biasanya menempati daerah/wilayah tersebut untuk menjalani hidup selama hidupnya. Biasanya seseorang yang dianggap penduduk di daerah/wilayah tersebut adalah seseorang yang KTP atau Kartu Tanda Penduduknya berasal dari daerah tersebut. Menurut BPS, penduduk merupakan orang yang berdomosili di wilayah Indonesia selama 6 bulan atau lebih serta mereka tinggal di wilayah Indonesia selama 6 bulan untuk menetap.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Jhingan (2000) mengatakan pertumbuhan penduduk pada suatu saat akan mengakibatkan keadaan yang disebut dengan stationary state yaitu saat dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali. Namun teori Neo Klasik menganggap penduduk memberikan sumbangan yang sangat positif terhadap pembangunan, terutama karena:

- a) Perkembangannya akan memperluas pasar
- b) Perbaikan dalam kemahiran dan mutunya adapat menciptakan berbagai akibat yang positif terhadap Pembangunan
- c) Penduduk menyediakan pengusaha yang inovatif yang akan menjadi unsur penting dalam menciptakan pembentukan modal

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Masalah yang akan dihadapi penambahan penduduk ini terutama adalah pangan, energi dan papan. Jumlah penduduk yang semakin banyak dari tahun ke tahun akan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari banyaknya jumlah penduduk, antara lain:

- a) Meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial
- b) Meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit lapangan dan peluang kerja
- c) Meningkatnya angka pengangguran

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah penduduk, ada tiga faktor yang dominan yaitu tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi atau perpindahan penduduk.

## **2.2. Hubungan antar variabel**

### **2.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Ketimpangan Pendapatan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi regional, dan peningkatannya menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat. Namun, peningkatan PDRB tidak selalu mencerminkan pemerataan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Ketimpangan pendapatan terjadi ketika hasil ekonomi tidak terbagi secara merata.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi pengukuran pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah selama periode waktu tertentu. Perbedaan laju pertumbuhan wilayah diindikasikan bahwa pendapatan perkapita rendah yang akan menyebabkan perbedaan pendapatan masyarakat di regional yang sama.

Todaro (2004) menjelaskan teori Kuznets dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan, artinya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif, artinya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan.

Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan adanya pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Mangundap et al., (2024) menemukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Maksud dari berpengaruh negatif artinya apabila Produk Domestik Regional Bruto mengalami peningkatan maka ketimpangan pendapatan akan mengalami perbaikan atau sebaliknya.

### **2.2.2. Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pendapatan**

Tinggi atau rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka tingkat produktivitas penduduk juga akan rendah kemudian produktivitas yang rendah akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan, begitu pula sebaliknya semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin tinggi tingkat produktivitas penduduk yang kemudian mendorong tingkat pendapatan menjadi semakin tinggi.

Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia. Cara meningkatkan pembangunan manusia yaitu meningkatkan kualitas program di bidang kesehatan, gizi, pendidikan, dan pelatihan yang konsisten akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mempersempit ketimpangan.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Farhan & Sugianto, (2022) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, Makipantung et al., (2023) menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dimana masyarakat yang berusia produktif bersekolah cenderung memilih mengejar ilmu di daerah sekitaran perkotaan dikarenakan tersedianya infrastruktur pendidikan yang lebih maju dibandingkan daerah asal.

### **2.2.3. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Ketimpangan Pendapatan**

Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk dengan jumlah yang besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Attaqi (2023) menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sahal (2023) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk program-program pelatihan membuat tingkat

pengangguran dapat terkendali sehingga tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan.

#### **2.2.4. Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Ketimpangan**

##### **Pendapatan**

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam suatu negara. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan akan menambah dan emigran akan mengurangi jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadi masalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan timpangnya distribusi pendapatan. Pemasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu jumlah penduduk muda dan tua juga akan berpengaruh pada produktivitas penduduk. Rasio dependensi yang tinggi

akibat besarnya jumlah penduduk usia muda dan tua juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu wilayah.

Latumaerissa (2015) mengatakan bahwa masalah jumlah penduduk perlu diketahui dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini berhubungan erat dengan penyediaan tenaga kerja. Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar dibawah standar.

Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Susanto et al., 2023). Hal ini disebabkan karena adanya migrasi menuju wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang belum signifikan sehingga penelitian ini dilakukan untuk memastikan pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan.

### **2.3. Studi Empiris**

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian Farhan & Sugianto (2022) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan menggunakan data dari 6 (enam) Provinsi di Pulau Jawa periode 2014-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa (2) kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa (3) indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

Penelitian Mangundap et al., (2024) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak yaitu Eviews 9. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon, dan Kota Manado.

Penelitian Makipantung et al., (2023) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Wilayah Kabupaten Minahasa. Data yang di gunakan merupakan gabungan dari 11 data times runtun waktu (*Times series*) dan Tempat (*cross section*) selama periode 2012-2022. Hasil regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan Tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan, sedangkan variabel Indeks Pembangunan

Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia secara simultan berpengaruh terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Wilayah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

Susanto et al., (2023) menemukan bahwa secara individual, jumlah penduduk dan IPM tidak memunculkan pengaruh yang signifikan bagi tingkat ketimpangan dalam hal ini pada konteks ketimpangan pendapatan. Namun, laju pertumbuhan ekonomi serta investasi memiliki pengaruh signifikan secara individu. Ketika diuji secara bersama-sama, laju pertumbuhan ekonomi, IPM, jumlah penduduk, serta investasi mempunyai pengaruh signifikan bagi presentase ketimpangan pendapatan.

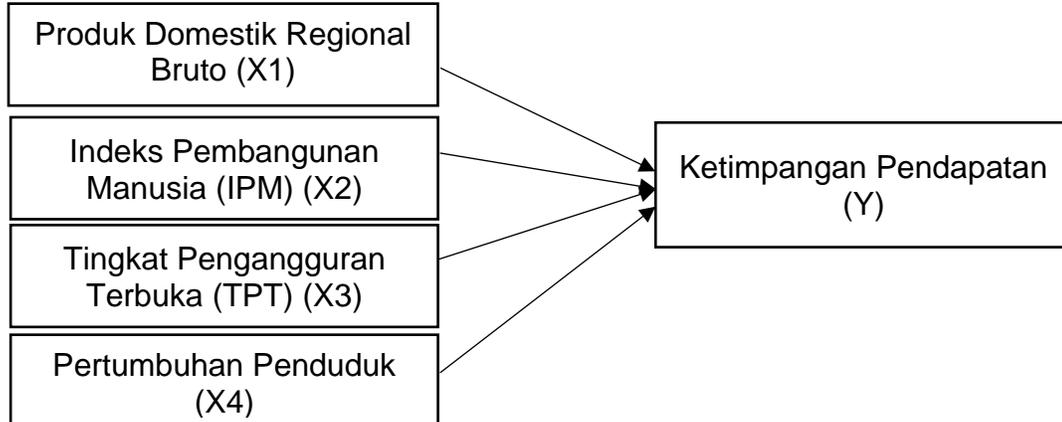
Arif & Wicaksani, (2017) menemukan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah pendekatan yang paling tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas dalam penelitian ini. Berdasarkan uji validitas pengaruh atau uji t, diketahui bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 adalah variabel IPM dengan arah koefisien positif.

Nadhifah & Wibowo (2021) menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel jumlah pekerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan,

selain itu tingkat pengangguran tersembunyi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

#### 2.4. Kerangka Konseptual

Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Masalah ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan dari faktor ekonomi merupakan masalah yang kompleks terjadi hampir di seluruh wilayah. Dari pemaparan tersebut maka dapat dibuat kerangka pikir penelitian sebagaimana pada gambar berikut. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1), variabel IPM (X2), TPT (X3) dan variabel Pertumbuhan penduduk (X4) diindikasikan dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan (Y). Dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

## **2.5. Hipotesis Penelitian**

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Diduga Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat
- 2) Diduga IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat
- 3) Diduga Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat
- 4) Diduga Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat